

## **ISLAMOFOBIA DI PRANCIS: DISKRIMINASI PEREMPUAN MUSLIM MAGHRIBI**

**Oleh:**  
**Petsy Jessy Ismoyo<sup>1</sup>**

### **ABSTRACT**

*France is a country with the largest Moeslem population in Europe, nearly 7,5% of the population are Moeslems. Ironically, radicalization has increased in the past 10 years. It affects the rise of Islamophobia and it continues to increase until 2015. The worst effects of Islamophobia experienced by Moeslems Maghribi Women in France.*

*This paper tries to show the relation between identity, Islamic context, and discrimination. The author tries to analyze the cause and impact of the discrimination to the identity of Moeslem Maghribi Women. Discrimination is focused on the difficulties to find a job. This paper is using qualitative method with literature study, and Theory of Identity by Stuart Hall.*

*The result is expected to give an overview of multiculturalism, Islamophobia, and discrimination against Moeslem Maghribi Women in France in order to defend the rights and freedom of the Moeslem Maghribi Women. The results also gives recommendation to the related parties, such as: government, French institutions, and media.*

**Keywords:** *Multiculturalism in France, Islamophobia, Identity, Discrimination, Women, Immigrant, Moeslem, Maghribi*

---

<sup>1</sup> Staf pengajar Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Komunikasi, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.

## 1. PENDAHULUAN

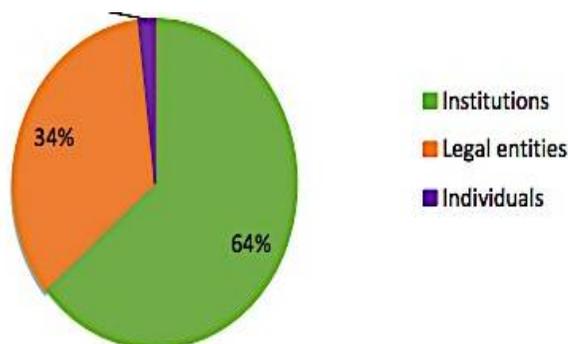
Bertolak dari sejarahnya, multikulturalisme di Prancis disinyalir terjadi pada masa pasca PD II. Prancis kekurangan banyak tenaga kerja, sehingga banyak imigran (terutama dari Afrika) datang ke Prancis untuk mencari pekerjaan. Tidak sedikit dari imigran membawa keluarga mereka dan menetap di Prancis. Sebagian besar dari imigran itu berasal dari ras negroid dan beragama Islam. Keberagaman yang terjadi akibat proses imigrasi menjadikan Prancis sebuah negara multikultur. Untuk lebih memahami definisi multikulturalisme, mengutip Bikhu Parekh dalam bukunya *Rethinking Multiculturalism*, multikulturalisme adalah keanekaragaman atau perbedaan yang dilekatkan secara kultural. Dalam proses pelekatan ini dibutuhkan toleransi untuk menerima kelompok lain sebagai suatu kesatuan dengan melepaskan dinding-dinding perbedaan (2008: 15).

Seiring berjalannya waktu jumlah imigran semakin bertambah, sehingga menjadi suatu wacana penting di Prancis karena keberadaannya mempengaruhi aspek-aspek krusial pada negara ini, seperti sosial, politik, dan budaya. Bentrokan budaya seperti tindak rasis penduduk asli terhadap imigran terjadi sedari kedatangan mereka hingga saat ini.<sup>2</sup> Kesenjangan sosial antara penduduk setempat dan imigran menimbulkan gesekan sosial yang berujung konflik dalam hubungan keduanya, seperti serangan terhadap tempat tinggal imigran (*banlieu*) dan tindak rasis lainnya. Masalah ini juga terjadi dalam politik, partai ekstrim kanan yang cenderung nasionalis bersikap xenophobia. Mereka menolak imigran karena dianggap mengganggu stabilitas masyarakat Prancis. Masalah xenophobia bukanlah hal baru di Prancis. Ketakutan akan pendatang sudah menjadi *momok* bagi sebagian masyarakat Prancis. Nicholas Sarkozy, mantan presiden Prancis adalah satu

---

<sup>2</sup> Vernelia R. Randall, Dayton School of Law, 2008  
(<http://academic.udayton.edu/race/06hrights/georegions/Europe/France01.htm>) diakses pada 30 Oktober 2016 18.00 WIB

contoh nyata anti-imigran.<sup>3</sup> Masalah xenophobia ini kemudian berkembang menjadi Islamofobia, salah satu bentuk rasis pada minoritas di Prancis. Masalah ini akan dipaparkan lebih mendetail pada bagian isi. Islamofobia menjadi lebih buruk setelah peristiwa Januari dan November pada tahun 2015 dan tragedi Nice dan Rouen 2016 kemarin. Hal dibuktikan berdasarkan data CCIF, tindakan Islamofobia yang terjadi tahun 2015 justru dilakukan oleh institusi (64%), badan hukum (34%), dan individu (2%) seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 1.1 Pelanggaran Islamofobia di Prancis 2015**  
**Sumber: Laporan Tahunan CCIF 2015**

Hasil survei CCIF membuktikan bahwa instrumen *laïcité* di Prancis dalam lembaga hukum dan institusi dipertanyakan keabsahannya. Representasi ideologi Prancis akan kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan gagal dalam pemerintahan Prancis saat ini. Jean-Lois Bianco, Presiden *Observatory of Secularism* menyatakan kekecewaannya akan eksploitasi politik dari konsep legal sekularisme yang dianut Prancis. Demikian pernyataan beliau dalam *Le Monde* pada 19 Januari 2016: "*Aristide Briand, Ferdinand Buisson, Jean Jaurès dan Georges Clemenceau menganggap hukum pemisahan negara dan agama adalah hukum liberal. Kemudian, mereka ingin*

<sup>3</sup> The New York Times, 5 Agustus 2010  
 ([http://www.nytimes.com/2010/08/06/opinion/06fri2.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2010/08/06/opinion/06fri2.html?_r=0)) diakses pada 30 Oktober 2016 18:15 WIB

*mengacaukan prinsip dasar laïcité, karena bagi mereka, pada dasarnya, apapun yang berhubungan dengan Islam adalah anti-republikan."*<sup>4</sup>

Dilihat dari krusialnya persoalan Islamofobia di Prancis dan dampaknya bagi perempuan imigran muslim maghribi, maka tulisan ini akan memaparkan mengenai identitas menurut teori identitas Stuart Hall demi menggali pemahaman mendalam terkait diskriminasi yang terjadi. Dari banyaknya kasus diskriminasi terhadap minoritas, konsep identitas yang dibahas adalah persoalan imigran perempuan muslim maghribi. Demikian dipaparkan karena ketiga faktor itu (perempuan, muslim, dan maghribi) dianggap merepresentasikan minoritas.

Diharapkan agar tulisan ini memberikan gambaran singkat mengenai Islamofobia, identitas kaum imigran perempuan muslim maghribi, kasus diskriminasi pada sekelompok identitas yang paling terdiskriminasi di Prancis, dan memberikan refleksi pada Indonesia sebagai negara multikultur.

## 2. KAJIAN TEORITIS

### 2.1 Teori Identitas Menurut Stuart Hall

Katherine Woodward dalam bukunya *Identity and Difference* menjelaskan bahwa Identitas adalah gagasan yang diberikan perihal konsep individu, sehingga asal-usul seseorang dapat diketahui. Identitas berasal dari banyak aspek seperti kebangsaan, etnis, ras, strata sosial, jenis kelamin, dan gender. Pembahasan Stuart Hall pada buku yang sama dijelaskan bahwa identitas bersifat tidak tetap dan selalu berubah. Identitas tidak dapat

---

<sup>4</sup> Arisitide Briand, Ferdinand Buisson, Jean Jaurès and ultimately Georges Clemenceau, had recalled that the law of separation of Churches and States was primarily a "law of liberty". Some want to undermine this basic principle, because for them, basically, anything that is linked to Islam is anti-republican by nature." (Le Monde, 2016)

dilepaskan dari representasi karena proses representasilah yang memiliki pengaruh tidak langsung dalam pembentukan identitas. Menurut Hall, identitas terbagi menjadi dua yaitu, *being* dan *becoming*. *Being* atau disebut juga dengan *self-subjectivity* adalah identitas yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri. Sementara itu, *becoming* adalah refleksi identitasnya pada situasi sosial sekitarnya. Identifikasi ini akan mengarah pada justifikasi identitas pada lingkungan sosialnya, yang disebut interpelasi.

Hall juga mengatakan selain identitas sebagai *self-subjectivity*, identitas juga mengalami proses diferensiasi. Proses pembedaan individu dengan lingkungan sekitarnya seperti dalam fase *mirror stade* dalam teori Lacanian. Diferensiasi membuat individu paham dengan adanya *the Other (outsiders)* yang dapat membawa pengaruh negatif dan positif seperti dua keping mata uang. Di satu sisi, diferensiasi menjadi sumber keragaman, heterogenitas, dan hibrida. Sementara di sisi lain, diferensiasi membawa pada stereotip rasis. Proses diferensiasi inilah yang akan membawa konsep identitas, *self*, dan *Others* pada identifikasi. Proses identifikasi ini terjadi dalam lingkungan sosial yang ditandai dengan adanya deliberasi identitas. Konflik dan alienasi tidak dapat dihindari dalam proses ini.

Hall juga menyatakan konsep identitas sebagai solidaritas sosial. Identitas tidak dilihat dari perspektif individu saja, namun dibawa ke satuan yang lebih besar sebagai aktor sosial: grup/kelompok, bangsa, atau negara. Dalam proses pembentukan identitas sebagai solidaritas sosial dibutuhkan adanya konfrontasi ide-ide terkait identitas rasial, nasional, dan kewarganegaraan sebagai bagian dari negara. Penanaman hal ini dapat dilakukan melalui teknologi komunikatif seperti radio, film, dan televisi yang bertujuan untuk membentuk solidaritas nasional. (1999: 51-59).

## 2.2 Fenomena Islamofobia di Perancis

Faktor utama yang melatarbelakangi munculnya Islamofobia di Eropa dibagi menjadi dua, yaitu: orientalisme barat dan tragedi 9/11 WTC di Amerika Serikat. Pertama, pemahaman orientalisme barat yang muncul pada abad ke-18 dan ke-19 yang mengarah pada perspektif subordinasi non-barat. Lalu, adanya tragedi 11 September 2001 di WTC yang memicu ketakutan berlebih pada terorisme yang dikaitkan dengan stereotip muslim.

Untuk elaborasi poin pertama dimulai pada sisi historis Eropa pada abad ke-18 dan ke-19 di mana pada era negara-negara Eropa berlomba untuk mengumpulkan negara koloni. Kolonialisasi yang mengarah pada negara-negara timur menyebabkan implikasi dan transfigurasi nyata terhadap perspektif barat pada timur (non-barat), dalam hal ini termasuk pada Islam (yang dianggap berasal dari timur). Secara tidak langsung, adanya superioritas negara Eropa yang menyatakan bahwa identitas wilayah timur (dalam hal ini termasuk muslim) adalah primitif, *uncivilized*, barbar, irasional, dan ditempelkan nilai-nilai yang inferior dibanding negara Eropa. Paham subordinasi barat ini berdampak jelas pada rasisnya masyarakat Eropa terhadap sesuatu di luar barat.

Jika dikaitkan dengan konsep 'the Other', timur diandaikan sebagai 'the Other' dan barat sebagai 'the Self' di mana budaya timur tidak memiliki kesamaan nilai budaya dengan barat. Bahkan, non-barat dapat dikategorikan sebagai "*radical Other*".<sup>5</sup> Seperti tertulis pada publikasi *The Rudymede trust*, sebuah badan NGO di UK pada tahun 1997 bahwa nilai budaya timur dinyatakan tidak memiliki pengaruh pada budaya barat.<sup>6</sup> Asumsi ini didukung

---

<sup>5</sup> European Union Project, In Other Words, 2010 (<http://www.inotherwords-project.eu/content/islamophobic-discourse-in-europe-the-reasons-behind-fear>) diakses pada 30 Oktober 2016 19.00 WIB

<sup>6</sup> Runny Mede, Intelligence for a Multi-ethnic Britain (<http://www.runnymedetrust.org/publications/pdfs/Islamofobia.pdf>) diakses pada 31 Oktober 2016 22.00 WIB

oleh teori bentrokan budaya oleh Samuel Huntington pada tahun 1996 menyatakan bahwa kebudayaan Eropa berakar pada "Judeo-christian" yang menjadi identitas. Hal ini menyebabkan Islam dan Arab yang hidup di Eropa menjadi sebuah ancaman, dilihat baik dari nilai tradisi, identitas, dan keamanan.<sup>7</sup> Hal nyata terjadi dalam dunia politik Eropa di mana golongan ekstrim kanan cenderung xenofobia bahkan Islamofobia, contoh pada Jean-Marie Le Pen dan Nicholas Sarkozy dari Prancis.

Superioritas Eropa menyebabkan mental masyarakat yang sulit menerima adanya perbedaan, sehingga masyarakat cenderung rasis dan menolak adanya integrasi dengan 'yang bukan barat'. Hal ini jugalah yang menjelaskan terjadinya xenofobia pada sebagian besar masyarakat Eropa. Ketakutan akan orang luar disinyalir akibat eksklusivitas 'barat', sehingga timbullah antipati tinggi pada non-barat. Sebagai akibatnya, timbul miskonsepsi yang mengarah pada stereotip-stereotip negatif bermunculan seiring dengan sikap rasis masyarakat. Hal ini dapat terlihat pada abad ke-19 di mana tingkat imigran asing meningkat pesat di Eropa. Adanya diskriminasi dan rasisme terhadap warna kulit menjadi fokus pada masa itu. Eropa melihat orang kulit hitam sebagai 'budak', 'tidak berpendidikan, lebih rendah dari orang kulit putih.

Seperti dijelaskan pada bagian pendahuluan, ketakutan akan pendatang (terutama kaum imigran) atau yang dikenal dengan xenophobia ada di Prancis dan berkembang menjadi Islamofobia pasca tragedi WTC. Tragedi 11 September 2001 membangkitkan rasa takut berlebihan pada terorisme yang diasosiasikan dengan Islam, sehingga menyebabkan alienasi pada kaum muslim dalam segala bidang dari pekerjaan, pendidikan, dan

---

<sup>7</sup> Loc. Cit.

rumah tangga. Menurut data *Eurospheres*, Islamofobia semakin meningkat pada enam tahun terakhir ini.<sup>8</sup>

Islamofobia juga ditandai dengan adanya dibuatnya "*La Loi Contre La Burqa*" oleh Jean-François Cope, Presiden UMP (*Union pour Un Mouvement Populaire*), pada 11 April 2011 dalam *Assemblée Nationale*. RUU ini kemudian disahkan oleh dewan dan dinyatakan adanya pelarangan pemakaian burqa di tempat umum. Tidak hanya di Prancis, di Swiss terjadi pelarangan pembangunan mesjid yang disuarakan oleh generasi muda. 7 Juli 2005 terjadi pengeboman yang menewaskan 53 orang di London, pelaku adalah pemuda muslim Inggris. Demonstrasi ini sampai ke Prancis, mahasiswa menolak adanya pembangunan mesjid sembari mengangkat tinggi-tinggi tulisan bahwa mereka mendukung Le Pen dengan gerakan nasionalisme ekstrim kanan. Berikut diperlihatkan salah satu contoh demo yang menyatakan dukungan pada Le Pen sebagai gambaran Islamofobia yang terjadi di Prancis.

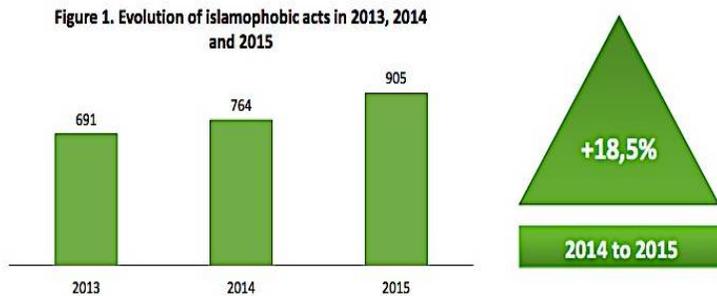
Di saat yang bersamaan, Nicolas Sarkozy mengesahkan putusan mengenai pelarangan penuh pemakaian burqa pada 21 April 2011. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial antara penduduk asli <maghribi, perempuan><laki-laki dan Katolik><Islam. Ketiga minoritas itu tinggal di tempat *ghetto* dan banyak tempat tinggal mereka terletak di Paris *Arr. 19* yang dikenal dengan daerah dengan tingkat kriminalitas yang cukup tinggi. Masalah kausalitas antara tingkat kesejahteraan imigran yang rendah dan kriminalitas merupakan masalah lain, dari stereotip negatif itu kita melihat bahwa integrasi multikultural kembali dipertanyakan statusnya.

Tahun 2015 merupakan tantangan bagi Multikulturalisme di Prancis. Dalam 10 bulan, Prancis mengalami dua serangan teroris yang menewaskan 146 korban. Kedua tragedi itu dilatarbelakangi oleh islamofobia. Data yang

---

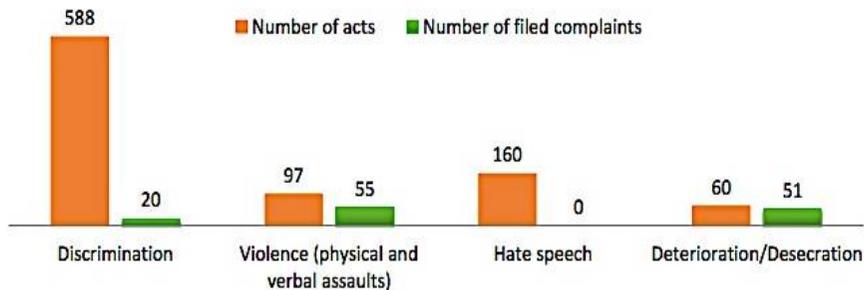
<sup>8</sup> Artan Fuga, *Multicultural in France: Evolutions and Change*, 2008 ([http://eurospheres.org/files/2010/08/Eurosphere\\_Working\\_Paper\\_12\\_Fuga.pdf](http://eurospheres.org/files/2010/08/Eurosphere_Working_Paper_12_Fuga.pdf)) diakses pada 1 November 2016 13.40 WIB

dicatat *Collectif Contre L'Islamophobie in France* (CCIF), tiga minggu sejak penyerangan *Charlie Hebdo* bulan Januari, terdapat 120 tindak kriminal berdasarkan islamofobia. Begitu pula tragedi 13 November, peristiwa ini membangkitkan reaksi negatif publik terhadap kaum muslim di Prancis. Dalam laporan tahunan CCIF seperti yang tertera pada gambar di bawah ini, tindak islamofobia meningkat pesat sebesar 18,5%, dari 764 kasus di tahun 2014 menjadi 905 di tahun 2015.



**Gambar 1.2 Diagram peningkatan Islamofobia di Prancis (2013-2015)**  
**Sumber: Laporan Tahunan CCIF 2015**

Fakta ini didukung oleh laporan tahunan (2015) CNCDH (*Commission Nationale Consultative des Droits de L'Homme*) yang menyatakan bahwa 'iklim diskriminasi' di Prancis meningkat dalam lima tahun terakhir. Dalam survei yang dilakukan CNCDH tentang praktik keagamaan Islam, shalat dan makanan *halal* yang dianggap sebagai 'penghalang' kehidupan bersama. Sekitar 47% penduduk Prancis memiliki opini negatif tentang kaum Muslim yang berada di Prancis, hanya 26% yang beropini positif. Hal ini membuktikan adanya radikalisasi terhadap opini publik terhadap Islamofobia (CNCDH, 2015: 216).



**Gambar 1.3 Diagram tipe tindakan Islamofobia di Prancis 2015**  
**Sumber: Laporan Tahunan CCIF 2015**

Fenomena Islamofobia meningkat dalam berbagai jenis tindakan. Dalam gambar 1.2, CIFF melakukan survei dan mendata keluhan yang masuk terkait Islamofobia pada tahun 2014-2015 dan memperlihatkan bahwa tindakan Islamofobia dibagi dalam empat tindakan: diskriminasi, kekerasan (fisik dan verbal), *hate speech*, dan penodaan terhadap agama. Diskriminasi mencapai 588 kasus, tapi hanya 20 laporan yang masuk ke CCIF. 97 kasus kekerasan (baik fisik maupun verbal) serta 55 laporan yang terdata. Sementara itu, tidak ada laporan dari 160 kasus *hate speech* yang terjadi. Lalu, terhitung 51 dari 60 kasus penodaan agama yang dilaporkan (CCIF 2015: 18).

CCIF mendata bahwa penyerangan fisik meningkat hingga 150%. Tahun 2014, hanya tercatat 22 laporan dan naik secara signifikan menjadi 55 laporan (naik 2,5%). Kekerasan simbolik naik hingga 140% dibandingkan tahun sebelumnya. Diskriminasi terhadap kaum muslim mencapai tahap krusial. Kaum muslim tidak hanya diserang, tapi juga ditargetkan dan ditolak keberadaannya dalam kehidupan sehari-hari (CCIF 2015: 19).

Peristiwa yang terjadi di Prancis pada tahun 2015 menimbulkan pemahaman keliru antara terorisme dan Islam. Kekeliruan ini tidak hanya terjadi di masyarakat saja, tapi menyeluruh pada tokoh politik dan jurnalis. Kedua kelompok itu memegang peranan kunci terjadinya radikalisisasi pada kaum muda di Prancis. Segregasi masyarakat yang menganggap Islam adalah teroris merupakan dampak dari ketidakpedulian masyarakat Prancis. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: ketimpangan akses pendidikan, tingkat pengangguran yang tinggi, diskriminasi dalam dunia kerja (INED, 2016).

### **2.3 Perempuan Muslim Maghribi: Stigma Ganda**

Diskriminasi dipaparkan fokus pada tiga aspek identitas karena posisi kaum itulah yang berada paling minor dari tingkatan sosial masyarakat Prancis. Dari sudut pandang Prancis, imigran maghribi merupakan inferior.

Begitu pula dalam gender, posisi perempuan adalah inferior dibandingkan dengan laki-laki. Tidak hanya itu, muslim juga merupakan inferior terlebih dengan islamofobia yang meningkat di Prancis. Hal ini menyebabkan diskriminasi berlapis-lapis terjadi imigran perempuan muslim maghribi.

Hal ini didukung dari informasi dari UNICEF bahwa sejak tahun 1982, 46% dari populasi imigran adalah perempuan. Pada tahun 2004, perempuan adalah mayoritas imigran yang berdiam di Prancis lebih dari 30 tahun. Pada 2006, 60% izin hunian dari imigran Afrika adalah milik perempuan.<sup>9</sup> Didukung data INSEE pada tahun 2005 juga bahwa imigran perempuan kebanyakan adalah maghribi.<sup>10</sup> Berdasarkan data itu terlihat kaum perempuan muslim maghribi berada dalam posisi tertinggi dalam jumlah. Ironisnya, mereka juga lah yang menempati posisi tersulit dalam proses integrasi multikultural.

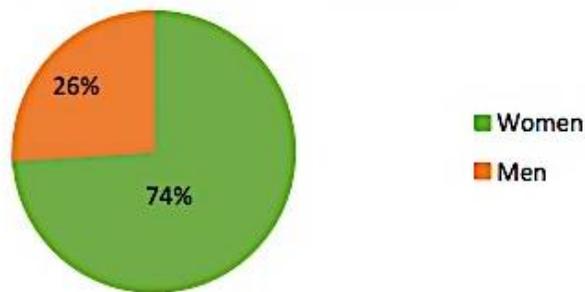
Berdasarkan *The Polish Institute International Affairs* yang mengutip data dari Eurobarometer, diskriminasi terhadap Islam bertambah parah dari tahun ke tahun. Islamofobia menjadi isu serius dalam multikulturalisme di Prancis. Data terbaru menyatakan bahwa Prancis (66%) adalah negara dengan tingkat diskriminasi paling tinggi, kemudian disusul oleh Belgia (60%), Swedia (58%), Denmark (54%), Belanda (51%), dan Inggris (50%). Dibandingkan dengan tahun 2009, terlihat peningkatan signifikan di tahun ini pada Prancis (66%) dan Belgia (60%). Persentase itu naik 30% dibandingkan tahun 2011, dan naik hampir lima kali lipat dibandingkan 1992.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Thomas Kirsbaum et. al, UNICEF Working Paper 'The Children Immigrants in France: The Emergence of a Second Generation', 2009 (<http://www.unicef-irc.org/files/documents/d-3278-The-children-of-immigrant.pdf>) diakses 1 November 2016 14.05 WIB

<sup>10</sup> *Les immigrés en France*, INSEE REFERENCES, Edition 2005

<sup>11</sup> Morgane Hoarau dan Patrycja Sasnal, 'The Rise of Islamophobia in France, The Polish Institute of International Affairs, 2013 ([https://www.pism.pl/files/?id\\_plik=13739](https://www.pism.pl/files/?id_plik=13739)) diakses pada 1 November 2016 14.30 WIB



**Gambar 1.4 Diagram diskriminasi terhadap perempuan muslim tahun 2015**  
**Sumber: Laporan tahunan CCIF 2015**

Data tahun 2015 yang diperlihatkan pada gambar 1.4 juga membuktikan bahwa 74% diskriminasi Islamofobia terjadi pada perempuan terutama bagi yang mengenakan penutup kepala. 79% masyarakat Prancis menganggap perempuan berkerudung adalah 'penghalang' bagi 'kehidupan bersama' di Prancis. Ironisnya, penolakan besar-besaran masyarakat Prancis terlihat di ranah publik, 93% responden menyatakan bahwa perempuan berkerudung tidak memiliki tempat di Prancis.<sup>12</sup>

Berikut contoh-contoh diskriminasi yang terjadi di Prancis pada kaum perempuan muslim maghribi, sehingga memperjelas posisi subordinat yang memojokkan bagi 'kaum imigran perempuan muslim maghribi' untuk hidup dan bertahan di Prancis. Perempuan direpresi dari segi agama untuk memakai burqa, namun dari segi sosial juga merepresinya untuk tidak menunjukkan identitas keagamaannya di ruang publik.

Diskriminasi terhadap kaum muslim terjadi dalam hal pekerjaan, pendidikan, dan domestik. Stereotip dan *prejudice* terkait Islam seperti perempuan dengan hijab dan burqa tidak diperbolehkan bekerja. Bahkan pada beberapa kasus yang terjadi hingga tahun 2015, adanya beberapa penyerangan pada perempuan yang menggunakan burqa dan niqab di ruang publik. Perempuan yang lebih muda tidak diperbolehkan masuk ke dalam

<sup>12</sup> Pierre Tévanian, *"Le voile médiatique. Un faux débat: l'affaire du foulard islamique"*, Paris, Liber, 2005.

ruang kelas karena problema yang serupa. Perlakuan ini didasari pada UU *Laïcité* yang meniadakan simbol agama di ruang publik justru berujung pada diskriminasi dalam prakteknya. Tidak hanya pada perempuan, laki-kali dengan wajah dipenuhi janggut diasosiasikan dengan teroris karena beragama Islam (seorang muslim).<sup>13</sup>

Peran tokoh politik dan jurnalis (media) juga memperparah identitas perempuan muslim maghribi. Kekerasan yang memaparkan tindakan seksis dan rasis menempatkan tubuh perempuan sebagai objek yang dihakimi oleh publik. Hal ini jelas bertentangan dengan 'esensi' *laïcité* yang justru menjamin kebebasan dengan memberi pembedaan antara agama dan ruang publik. Kasus penutup kepala bagi perempuan muslim ini masih menjadi wacana politik yang belum menemukan jalan keluar.

Integritas perempuan akan haknya mengenakan penutup kepala sebagai salah satu kewajiban dalam agamanya seakan dibatasi oleh pemenuhan kewajiban sipil. Toleransi dari masyarakat pun tidak diterima oleh kaum perempuan muslim maghribi. Posisi media memperparah representasi perempuan muslim maghribi dengan 'memberikan' stigma ganda akan diskriminasi yang dilakukan masyarakat Prancis. Hal ini seakan dehumanisasi kaum perempuan muslim maghribi.

Diskriminasi juga terjadi pada perempuan mengingat subordinasi laki-laki. 80% tindakan diskriminasi yang terjadi pada perempuan di Prancis yang berkedung. Kekerasan fisik juga melibatkan tubuh perempuan sebagai korban (kekerasan seksual). Fenomena ini menimbulkan pertanyaan lanjutan: 'Apakah Prancis tidak hanya sekedar Islamofobia, tetapi juga misoginis?'<sup>14</sup>.

---

<sup>13</sup> FRANCE 24, 'Muslims in Europe Face Discrimination, Says Amnesty, 2012 (<http://www.france24.com/en/20120423-amnesty-international-report-says-muslims-victims-discrimination-europe>) diakses pada 1 November 2016 16.00 WIB

<sup>14</sup> Aude Lorriaux, "Les actes anti-musulmans cachent-ils une misogynie?", *Slate.fr*, 3 November 2015.

Diskriminasi terlihat jelas dalam bidang pekerjaan bahwa adanya kesenjangan upah pekerja perempuan dan laki-laki. Bahwasanya, perempuan mendapat upah 25% lebih rendah dari laki-laki terlepas dari apapun bidang pekerjaannya. Tidak hanya upah, kesempatan pekerjaan paruh waktu juga lebih banyak bagi perempuan mengingat perempuan juga harus mengurus urusan rumah tangganya.<sup>15</sup>

Diskriminasi juga terjadi hampir di seluruh ruang publik: sekolah, lembaga institusi pemerintah, kantor polisi, balai kota, sampai supermarket. Selain itu, akses kesehatan dan *leisure* bagi perempuan muslim maghribi juga dibatasi. Masalah hukum prostitusi juga dianggap merugikan perempuan. Hal itu juga menjadi indikasi adanya diskriminasi pada kaum perempuan (CIFF, 2015).

#### **2.4 Diskriminasi Perempuan Muslim Maghribi Dalam Bidang Pekerjaan**

Diskriminasi dalam bidang pekerjaan menjadi perhatian karena berhubungan erat dengan kesejahteraan hidup individu. Pekerjaan adalah sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tingkat pekerjaan berhubungan erat dengan pendapatan finansial. Hal itulah yang mendasari pembahasan akan diperdalam pada diskriminasi dalam bidang pekerjaan. Namun sebelum masuk pada analisis identitas imigran perempuan muslim maghribi, penting untuk diingat bahwa sebagian besar dari imigran berasal dari maghribi, perempuan, dan beragama muslim. Data INED memperlihatkan bahwa di tahun 2015, 100% diskriminasi terjadi pada kaum perempuan muslim maghribi (INED, 2015).

Melihat pemaparan di atas, diskriminasi paling banyak yang terjadi pada imigran perempuan muslim maghribi adalah dalam sektor pekerjaan.

---

<sup>15</sup> Sandra Cavaco dan Fabienne Tournadre, 'Pay Equity Illusion: Discrimination against Women in France, 2012

([http://www.afse.fr/docs/cavaco\\_sandra\\_tournadre\\_fabienne\\_texte.pdf](http://www.afse.fr/docs/cavaco_sandra_tournadre_fabienne_texte.pdf)) diakses 1 November 2016 14.50 WIB.

Oleh karena itu, berikut akan dipaparkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Jean-François Amadieu dari Université Paris-Sorbonne 1 mengenai diskriminasi nyata yang memperkuat posisi imigran perempuan muslim maghribi sebagai kaum yang teralienasi dan mendapatkan perlakuan diskriminasi berdasarkan identitas yang terdapat pada dirinya. Amadieu membuktikan dalam penelitiannya bahwa tingkat diskriminasi pada pencarian pekerjaan berbasis kompetensi (yang mana wajar), namun pertimbangan berikutnya fokus pada gender. Kesempatan perempuan untuk mendapatkan pekerjaan lebih sedikit. Bukti ini memperkuat argumen pada pemaparan sebelumnya. Tidak dipungkiri bahwa domisili sang pelamar pekerjaan menentukan kesempatannya dalam dunia pekerjaan. Kewarganegaraan Prancis bertempat tinggal di *banlieu* akan menuai pertimbangan lebih pada perusahaan mengingat posibilitas jika ia adalah keturunan seorang imigran. Di samping itu, faktor warna kulit (ras) juga mempengaruhi tingkat kesulitan mencari pekerjaan di Prancis. Orang kulit hitam (negroid) lebih sulit mendapatkan pekerjaan daripada orang kulit putih (kaukasoid).

Penelitian berikutnya datang dari Marie-Anne Valford yang bekerjasama dengan Claire L. Adida dan David D. Laitin yang mengidentifikasi diskriminasi dalam bidang ekonomi yang dialami muslim di Prancis (terutama imigran). Ketiga orang ini melakukan dua penelitian. Keduanya berkaitan dengan diskriminasi perempuan muslim dalam bidang ekonomi. Kedua penelitian itu dilakukan pada 5 Maret 2013 dan 20 Desember 2012. Hasil penelitian dikemukakan bahwa kaum imigran muslim mengalami kesulitan dalam proses asimilasi (sulit untuk lepas dari komunitasnya dan cenderung menolak identifikasi dengan budaya setempat). Fenomena ini kemudian populer dengan istilah '*moeslem effect*'.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Adida, Claire L., Laitin, David D., Valford, Marie-Anne. *Women, Muslim Immigrants, and Economic Intergrations*. Stanford University & Paris-Sorbonne 1: 2012.

Sementara itu, hasil penelitian lainnya membuktikan bahwa adanya indikasi nama muslim seperti 'Khadijah', 'Aboubacar', 'Mohammad' lebih sedikit mendapat panggilan kembali setelah pengiriman CV. Perbandingan ini dilihat dari nama kandidat "Marie Diouf" sebagai keturunan Senegal-Prancis Kristen, dan "Khadijah Diouf" dengan nama muslim. Kedua nama itu bersaing dengan kandidat "Aurélie Menard" yang terdengar asli Prancis, tanpa diketahui agamanya. Persaingan antara ketiganya menempatkan Khadijah pada posisi terbawah, sementara Marie dan Aurélie berada pada posisi yang sama. Perbandingan antara Aurélie, Marie, dan Khadijah adalah 4: 4: 1. Setiap 100 panggilan pekerjaan yang diterima Aurélie dan Marie, Khadijah hanya menerima 30 panggilan. Perempuan muslim dianggap tidak wajib untuk bekerja karena akan diurus oleh keluarga mereka. Hal inilah yang menyebabkan rendahnya peluang perempuan muslim mendapatkan pekerjaan di Prancis.<sup>17</sup>

Melihat pemaparan di atas, keragaman budaya dan isu nasionalisme di Prancis perlu ditelaah kembali mengingat integrasi yang gagal dalam proses multikulturalisme. Untuk menelaah lebih jauh diskriminasi yang terjadi, bab berikutnya akan membahas identitas dan representasi sosial berdasarkan teori Stuart Hall dengan tujuan agar keadaan sosial masyarakat multikultur yang ideal dapat terintegrasi, dan pemahaman mengenai identitas multikultur dapat dimengerti lebih baik.

## **2.5 Kajian Ulang Identitas Imigran Perempuan Muslim Maghribi**

Mengingat bahwa identitas adalah 'produksi' yang tidak pernah sempurna, selalu dalam proses, selalu dikembangkan dari dalam (interpelasi), bukan dari luar (representasi), kajian ulang terhadap identitas perlu dilakukan. Hal ini dilakukan untuk melihat subyektivitas, identifikasi, dan *positioning* dari imigran perempuan muslim maghribi dalam proses integrasi dengan lingkungan sosialnya.

---

<sup>17</sup> Loc. Cit.

Hal ini sesuai dengan penjelasan Hall bahwa identitas kultural bersifat kolektif. Identitas ini ada ada dari identifikasi berbasis pada sejarah dan leluhur yang sama (Hall, 51). Hall membagi identitas sebagai tiga kesatuan besar, yaitu: identitas sebagai subjektivitas, identitas sosial dan konsep 'the Other', dan identitas negara sebagai solidaritas sosial yang dianggap dapat menjadi solusi terhadap diskriminasi imigran perempuan muslim maghribi ini.

Penting untuk diingat bahwa dalam identitas budaya, pemaparan identitas ini hanya untuk memberikan gambaran posisi subordinat imigran perempuan muslim maghribi, sebagai esensi. Identifikasi menuju identitas sebagai solidaritas sosial lah yang dianggap "*positioning*" dalam proses integrasi. Hal itu dapat mengurangi konflik dan alineasi dalam isu multikulturalisme. Berikut akan dipaparkan identitas imigran perempuan muslim maghribi berdasarkan teori identitas Hall.

Seperti disebutkan dalam kerangka teori, Hall membagi identitas sebagai subjektivitas dalam dua bagian yaitu: *being* dan *becoming*. Dalam kasus diskriminasi imigran perempuan muslim maghribi, ada empat identitas berbeda yang terlihat dari imigran, perempuan, muslim, dan maghribi. Keempat identitas itu dapat dilihat sebagai satuan identitas sebagai satuan *self-identity*.

Identitas perempuan digolongkan sebagai identitas seksual di mana individu memahami *positioning* sosialnya di masyarakat yang bertolak pada kesadaran psikis dan mental terhadap jenis kelamin dan gendernya. Pada konsep *being*, proses interpelasi terjadi karena adanya diferensiasi perempuan sebagai 'self' dengan laki-laki sebagai 'Others'. Perbedaan yang ada membuat perempuan menyadari adanya diferensiasi. Sehingga, perempuan sudah menuntut hak yang sama sejak masa *Revolution Sexuelle* pada Mei 1968. Identitas perempuan di sini mengalami perubahan signifikan dari pergerakannya yang terbatas pada bidang domestik, menjadi setara

dengan laki-laki. Proses *becoming* juga terpapar jelas dalam proses pembentukan *being*.

Representasi sosial perempuan saat ini merupakan bukti nyata identitas yang bersifat tidak stagnan. Jika dihubungkan dengan kasus diskriminasi yang dipaparkan dalam tulisan ini, perempuan telah menyadari identitasnya dan memutuskan untuk masuk dalam proses deliberasi identitas. Perempuan mempertanyakan kembali posisinya dalam bidang pekerjaan dengan menuntut kesetaraan dengan kaum laki-laki. Hal ini terlihat dalam demo pada tahun 2003 yang mendukung pergerakan perempuan pekerja muslim. Demo ini memerangi diskriminasi atas stereotip perempuan berdomisili di daerah *banlieu*.

Berikutnya mengenai identitas religius, identitas religius adalah identitas yang berkaitan dengan iman seseorang. Identitas religius seseorang biasanya pada tahap *being* adalah perihal dirinya dengan kepercayaannya dengan konsep ketuhanan. Namun pada posisi *becoming*, agama saling terikat dengan tradisi keagamaan yang membuat ritual keagamaan tidak terlepas dari konteks sosial masyarakat. Sebagai contoh, bagi sebagian orang identitas religiusnya merupakan masalah pribadi; dirinya dengan imannya. Namun sebagai seorang aktor sosial, ia harus menjalankan perannya sebagai identitas terkait agama yang dipercayainya. Ia harus terikat dengan aturan keagamaan yang dibentuk dan menjalankan ritual keagamaan itu.

Misalnya, pada kaum perempuan muslim di Prancis. Dalam tahapan *being*, agama hanya problematika iman pribadi masing-masing. Konflik justru timbul ketika adanya identifikasi dalam deliberasi identitas. Saat perempuan muslim diwajibkan memakai burqa atau niqob menurut agama mereka. Identitas religius mereka diuji baik dalam proses interpelasi dan deliberasi ini. Konflik makin runcing ketika identitas religius mereka harus bertabrakkan dengan identitas nasional mereka di mana Prancis melarang adanya pemakaian burqa dan niqab berdasarkan UU *Laïcité*. Pada tahapan ini,

perempuan muslim mengalami krisis identitas. *Positioning* tidak dapat dilakukan, begitu juga proses deliberasi. Sehingga, konflik dan alienasi tidak dapat dihindarkan bagi perempuan muslim terkait identitas religius mereka yang berkaitan erat dengan identitas nasionalnya itu.

Sementara itu, identitas nasional adalah identitas sebagai bagian dari negara terkait, dalam hal ini adalah Prancis. Identitas nasional mungkin bukan jadi pertanyaan bagi penduduk asli Prancis, namun ini menjadi persoalan besar bagi kebanyakan generasi ketiga imigran di Prancis. Selalu timbul pro dan kontra mengenai identitas mereka. Generasi ketiga imigran Prancis adalah orang-orang yang lahir dan besar di Prancis, namun berasal dari keturunan imigran. Sebagian penduduk asli yang tidak mampu berintegrasi menyatakan bahwa generasi ketiga bukanlah bagian dari penduduk asli Prancis, mereka tetaplah menyandang status imigran.

Namun secara hukum, identitas nasional mereka adalah penduduk Prancis. Hal ini disimpulkan demikian dari definisi KBBI, warga negara adalah penduduk negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, yang menjalani kewajiban sebagai warga negara. Adanya konflik dalam proses deliberasi sosial ini menyebabkan *being* dan *becoming* generasi ketiga menjadi tumpang tindih.

Dalam *being*, para imigran merasa mereka adalah warga negara Prancis, namun hal berbeda dirasakan dari situasi sosialnya yang 'mayoritas' tidak menerima mereka sebagai 'warga negara Prancis'. Hal ini menyebabkan *becoming* para generasi ketiga imigran ini berada pada krisis identitas, sehingga berpengaruh pada proses interpelasi, dan menggoyahkan *being* mereka yang tadinya warga negara. Para imigran ini mempertanyakan kembali identitas nasional mereka dalam *positioning*-nya di masyarakat.

Identitas ras berkaitan erat dengan identitas nasional terkait problematika generasi ketiga imigran. Imigran maghribi merupakan

persentase terbesar dari keseluruhan imigran yang menetap di Prancis. Daerah imigran ini dikenal dengan *banlieu* mempengaruhi *being* dan *becoming* generasi ketiga imigran. Identitas maghribi dalam *being* dan *becoming* mendapat posisi subordinat dalam perannya di lingkungan sosial. Representasi *ghetto* atau daerah *banlieu* lekat dengan faktor murahnya sewa tempat tinggal, rendahnya tingkat keamanan, dan ketidaknyamanan daerah pemukiman imigran. Hal ini mempengaruhi identitas *becoming* maghribi yang diidentifikasi sebagai kaum kelas bawah dengan tingkat 'pendidikan' rendah, status finansial yang juga rendah, dan cenderung kriminal. Representasi ini mempengaruhi *being* maghribi yang tidak terlepas dari tiga karakter itu yang tentunya membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan. Justifikasi itu membentuk identitas para maghribi itu, sehingga kaum maghribi berada dalam posisi krisis mempengaruhi tidak berjalannya proses integrasi.

Adanya diferensiasi, perbedaan identitas baik dari rasial, religius, nasionalisme, dan gender, mengarah pada proses identifikasi. Identifikasi ini membentuk representasi sosial dengan adanya deliberasi identitas yang menyebabkan konflik dan alienasi sesuai dengan teori Hall. Pada keempat identitas itu dapat dilihat adanya pencarian '*unified sense*' dari konsep '*self*' melalui sistem simbol yang berlaku di masyarakat. Hal ini nampak dari *becoming* dan representasi sosial tiap identitas. *Positioning* yang melibatkan identitas sebagai *self-subjectivity* dan memahami adanya konsep *self* dan *Others* ini memperlihatkan identitas multikultural Prancis yang merupakan satuan kolektif dari banyaknya *self* dan *Others*. Pemaparan ini juga membuktikan bahwa adanya 'produksi' identitas yang tidak berhenti. Krisis identitas yang dialami tiap identitas adalah bukti adanya identifikasi dan interpelasi itu sendiri.

## 2.6 Re-Identifikasi Identitas Nasional Sebagai Solidaritas Sosial

Sebenarnya, keempat identitas ini tidak dapat terpisahkan dalam suatu konsep kelompok sosial. Identitas perempuan, imigran, muslim, dan maghribi adalah bagian dari identitas multikultural Prancis. Keempat identitas itu berbasis identifikasi sejarah dan budaya yang sama, sehingga *positioning* masing-masing identitas mengarah pada sebuah identitas negara dengan cakupan kolektif yang lepas dari individu.

Pentingnya solidaritas sosial dalam proses integrasi dapat dijadikan solusi dari krisis identitas yang dialaskan pada perspektif individu. Identitas sebagai basis untuk solidaritas sosial memperlihatkan formasi yang membutuhkan hubungan manusia dengan teritorinya. Adanya dinamika situasi geografis diperlihatkan sebagai satu alasan identitas negara ini menjadi perhatian lebih. Identitas multikultural Prancis memfokuskan pada solusi alternatif konflik dan alienasi pada eksplorasi 'rasa saling memiliki' sebagai identitas yang tinggal di wilayah yang sama. Masalah diskriminasi imigran perempuan muslim maghribi dapat dilihat dari sudut pandang lebih luas. Bahwasanya, identitas kaum itu adalah kesatuan identitas masyarakat multikultur Prancis. Hal ini meruntuhkan semua batasan identitas dalam satuan pribadi, sehingga tindakan opresi pun berkurang.

Seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa *positioning* sebuah identitas budaya didasarkan pada sejarah dan budaya yang sama, begitu pula konsep identitas sebagai solidaritas sosial. Identitas multikultural Prancis harus menyadari bahwa adanya identifikasi diaspora di mana toleransi membentuk identitas yang berdasar pada daerah geografis. Hal ini mengarah pada solusi alternatif, sehingga identitas bukan lagi masalah determinasi atas dasar *self-subjectivity*. Dengan pemahaman ini, masyarakat multikultur diharapkan dapat meredakan kondlik dengan menawarkan opsi-opsi yang lepas dari domisi identitas (dalam lingkup *self-subjectivity*) dalam keputusan politik.

Adanya identitas religius antara Islam dan Katolik, identitas seksual antara perempuan dan laki-laki, identitas nasionalis antara imigran dan penduduk asli; baik maghribi atau ras lainnya, memberi ruang pada interpretasi kekuasaan. Hal ini menyebabkan posisi superioritas-subordinat. Sementara dalam identitas negara sebagai solidaritas sosial, hal itu dihilangkan. Identitas dilihat sebagai suatu kesatuan besar yang membuat masyarakat bersama-sama dalam proses interpelasi dan identifikasi yang sama. Identitas Prancis berkiblat pada *liberté, égalité, fraternité*, yang mengedepankan prinsip kesetaraan, kebebasan, dan kebersamaan sebagai sebuah negara. Maka dari itu, masyarakat dapat lebih toleran menghadapi perbedaan.

Solusi yang ditawarkan ini dapat disampaikan melalui rekomendasi kepada pemerintah, lembaga institusi publik, media, dan masyarakat di Prancis. Pemerintah dan lembaga institusi publik di Prancis diharapkan lebih banyak lagi menciptakan dialog terbuka dengan *civil society* terkait kaum perempuan muslim maghribi. Hal ini dirasa perlu untuk meningkatkan toleransi di antara masyarakat Prancis. Pemahaman bahwa Islamofobia bukanlah sebuah opini, melainkan paham yang berakar pada rasisme dan alienasi kelompok minoritas dengan menggunakan kekerasan baik fisik, verbal, dan simbolik. Dalam perjalanannya, pemerintah diharapkan dapat mendorong setiap kementerian untuk menjamin hak akses kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan bagi kaum perempuan muslim maghribi. Dukungan negara bagi lembaga seperti CIFF dan lembaga lain yang memberi pemahaman tentang diskriminasi Islamofobia dirasa perlu.

Pendidikan multikultur perlu diterapkan tidak saja di ranah edukasi, tetapi juga di seluruh kelompok masyarakat. Pelatihan profesional terkait pemahaman ras, etnis, gender, dan toleransi akan perbedaan dengan bekerjasama dengan organisasi non-pemerintah dan *civil society* diharapkan mengurangi stigma yang beredar tentang Islamofobia. Dalam bidang pekerjaan, perlunya peraturan penerimaan pekerja yang tidak diskriminatif.

Kerja sama bagian struktural perusahaan juga diharapkan memberikan arahan pada setiap pekerjaannya agar tidak melakukan tindak diskriminatif. Diseminasi yang didasarkan pada promosi kemajemukan sebuah perusahaan juga dinilai dapat menjadi nilai lebih 'citraan' dan daya tarik perusahaan.

Selain itu, perlunya peran media untuk bersifat komunikatif yang tidak memperlihatkan identitas sebagai kesatuan terpisah. Media diharapkan tidak menggiring opini publik pada wacana yang mengarah pada 'dekonstruksi identitas'. Kebebasan pers baiknya tetap berada pada bingkai 'pluralisme' bukan 'terorisme', 'jidahist', 'muslim', dan 'radikalisme' yang dikaitkan dengan wacana-wacana politik. Adanya media sebagai perantara simbol menjadi peranan penting untuk menghantarkan pada integrasi. Identitas dilihat sebagai satuan kolektif yang lebih besar, sehingga menumbuhkan rasa saling memiliki lepas dari tembok perbedaan ras, agama, etnis, budaya, dan gender.

### **3. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan yang didapatkan dari pemaparan ini adalah pemahaman mengenai Islamofobia yang terjadi di Prancis, terutama pada imigran perempuan muslim maghribi yang mengalami posisi paling sulit karena adanya diskriminasi yang bertubi-tubi. Diskriminasi dipersempit pada bagian pencarian pekerjaan, mengingat bahwa faktor pekerjaan adalah pendukung penting dalam kesejahteraan hidup individu. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa diskriminasi nyata terjadi pada imigran perempuan muslim maghribi. Adanya diskriminasi ini kemudian dielaborasi lebih jauh dengan pemahaman identitas dari sudut pandang teori identitas Hall. Hal itu memperlihatkan identitas dan representasi sosial masyarakat Prancis. Dari titik itu, Prancis sebagai masyarakat majemuk penting menyadari identitas negaranya sebagai sebuah solidaritas sosial yang membawa Prancis ke arah

yang lebih baik dalam menghadapi diskriminasi yang mengarah pada konflik dan alienasi identitas tertentu.

Prancis dan Indonesia yang merupakan dua contoh negara multikultural. Melihat pemaparan sebelumnya mengenai identitas masyarakat multikultural Prancis dengan slogan yang bertumpu pada kesetaraan, kebebasan, dan kebersamaan. Hal serupa terjadi di Indonesia. Indonesia sebagai identitas nasional mengacu pada Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika. Sadar dengan perbedaan memperkaya Indonesia menjadi sebuah negara kesatuan yang menjadi contoh identitas budaya multikultur. Dengan prinsip toleransi tinggi terhadap perbedaan agama, tingkat sosial, gender, ras, dan etnis, proses integrasi tentu tidak luput dari diskriminasi yang terjadi. Namun, itulah bagian dari diferensiasi yang juga menjadi tanda keberagaman Indonesia.

Indonesia dalam proses integrasinya dinilai sedikit lebih maju dari Prancis. Hal ini dibuktikan dari sejarahnya di mana pada masa Majapahit dan Sriwijaya, Nusantara memang merupakan sebuah kesatuan masyarakat majemuk. Hal ini menjadi refleksi bagi masyarakat Indonesia untuk menghadapi beberapa kasus terkait diskriminasi yang terjadi akhir-akhir ini seperti: kasus pelarangan pembangunan rumah ibadah yang marak terjadi di daerah P. Jawa, konflik baik di Aceh, Poso, dan Maluku terkait agama, ras, etnis, dan suku.

Tidak hanya itu, tindakan rasial bagi etnis kaum cina atau stereotip pada suku-suku juga harus diminimalisir mengingat identitas kolektif pada taraf nasional sebagai warga negara Indonesia. Pembahasan Islamofobia di Prancis ini diharapkan menjadi sebuah refleksi untuk tidak mempersoalkan masalah mayoritas-minoritas terkait SARA, pentingnya menyadari perbedaan dan kompleksitas Indonesia sebagai masyarakat multikultur, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta kesetaraan hak dan kewajiban pada setiap individu. Hal ini diharapkan tidak hanya diterapkan pada individu saja,

melainkan diterapkan pada politik, ekonomi, sosial, dan aspek lainnya dalam negara. Demikian adanya agar toleransi akan perbedaan pun tercipta, sehingga konflik dan alienasi dapat dihadapi dengan baik.

\*\*\*\*\*

**DAFTAR PUSTAKA**

Adida, Claire L., Laitin, David D., Valfort, Marie-Anne. 2012. *Women, Muslim Immigrants, and Economic Integrations*. Paris: Stanford University & Paris-Sorbonne 1.

Barker, Chris. 2000. *Cultural Studies: Theory and Practice*. London: SAGE Publications

Parekh, Bhikhu. 2008. *Rethinking Multiculturalism*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Woodward, Kathryn. 1999. *Identity and Difference*. London: SAGE Publication.

**SUMBER ONLINE**

Artan Fuga, Multicultural in France: Evolutions and Change, 2008 ([http://eurospheres.org/files/2010/08/Eurosphere\\_Working\\_Paper\\_12\\_Fuga.pdf](http://eurospheres.org/files/2010/08/Eurosphere_Working_Paper_12_Fuga.pdf)) diakses pada 1 November 2016 13.40 WIB.

Aude Lorriaux, "Les actes anti-musulmans cachent-ils une misogynie?", *Slate.fr*, 3 November 2015 (<http://www.slate.fr/story/106363/actes-anti-musulmans-misogynie>) diakses 2 November 2016 14.15 WIB.

Collectif Contre L'Islamophobie en France, Annual Report 2016, 2016 ([http://www.islamophobie.net/sites/default/files/CCIF-Annual-Report-2016\\_0.pdf](http://www.islamophobie.net/sites/default/files/CCIF-Annual-Report-2016_0.pdf)) diakses pada 10 November 2016 17.19 WIB.

European Union Project, In Other Words, 2010 (<http://www.inotherwords-project.eu/content/islamophobic-discourse-in-europe-the-reasons-behind-fear>) diakses pada 30 Oktober 2016 19.00 WIB.

FRANCE 24, 'Muslims in Europe Face Discrimination, Says Amnesty, 2012 (<http://www.france24.com/en/20120423-amnesty-international-report-says-muslims-victims-discrimination-europe>) diakses pada 1 November 2016 16.00 WIB.

*Les immigrés en France*, INSEE REFERENCES, Edition 2005 (<http://www.insee.fr/fr/ppp/sommaire/PERSAG05.PDF>) diakses 1 November 2016 14.00 WIB.

Morgane Hoarau dan Patrycya Sasnal, 'The Rise of Islamophobia in France, The Polish Institute of International Affairs, 2013 ([https://www.pism.pl/files/?id\\_plik=13739](https://www.pism.pl/files/?id_plik=13739)) diakses pada 1 November 2016 14.30 WIB

Pierre Tévanian, "*Le voile médiatique. Un faux débat: l'affaire du foulard islamique*", Paris, Liber, 2005 ([https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/DA\\_SILVA/13043](https://www.monde-diplomatique.fr/2005/12/DA_SILVA/13043)) diakses pada 2 November 2016 15.50 WIB.

Runny Mede, Intelligence for a Multi-ethnic Britain (<http://www.runnymedetrust.org/publications/pdfs/Islamofobia.pdf>) diakses pada 31 Oktober 2016 22.00 WIB

Sandra Cavaco dan Fabienne Tournadre, 'Pay Equity Illusion: Discrimination against Women in France, 2012 ([http://www.afse.fr/docs/cavaco\\_sandra\\_tournadre\\_fabienne\\_texte.pdf](http://www.afse.fr/docs/cavaco_sandra_tournadre_fabienne_texte.pdf)) diakses 1 November 2016 14.50 WIB.

The New York Times, 5 Agustus 2010 ([http://www.nytimes.com/2010/08/06/opinion/06fri2.html?\\_r=0](http://www.nytimes.com/2010/08/06/opinion/06fri2.html?_r=0)) diakses pada 30 Oktober 2016 18:15 WIB

Thomas Kirsbaum et. al, UNICEF Working Paper 'The Children Immigrants in France: The Emergence of a Second Generation', 2009  
(<http://www.unicef-irc.org/files/documents/d-3278-The-children-of-immigrant.pdf>) diakses 1 November 2016 14.05 WIB.

Vernelia R. Randall, Dayton School of Law, 2008  
(<http://academic.dayton.edu/race/06hrights/georegions/Europe/France01.htm>) diakses pada 30 Oktober 2016 18.00 WIB